



PENDAMPINGAN SISTEM AKUNTANSI E-BLUD DI PUSKESMAS JENAWI, JATIJOSO DAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

Syahriar Abdullah¹, Supartini Supartini², Istinganah Eni Maryanti³, Rahmatya Widyaswati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

*e-mail: rahmatya@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu peningkatan akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Karanganyar melalui pendampingan pelaporan keuangan BLUD berbasis akrual. BLUD Puskesmas menghadapi berbagai tuntutan akuntabilitas dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya yang paling krusial adalah terkait pelaporan keuangan. Pada saat yang sama, BLUD Puskesmas memiliki keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam hal pemahaman pengelolaan dan pelaporan keuangan mengingat sebagian besar SDM pengelola keuangan tidak memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Di sisi lain, terdapat trade-off yang timbul dari sisi pelayanan prima dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama pandemi COVID-19 yang menjadikan topik ini menarik untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana BLUD Puskesmas menjaga akuntabilitas keuangannya dengan adanya peningkatan risiko akan terjadinya tindakan fraud yang merugikan negara, terutama mempertimbangkan peningkatan anggaran dan beban kerja. BLUD Puskesmas di Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah melakukan pengadaan sistem pelaporan keuangan berupa E-BLUD pada tahun 2021 untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pelaksanaannya tidaklah mudah karena BLUD Puskesmas menghadapi beberapa masalah seperti keterbatasan SDM serta kendala komunikasi dengan institusi vertikalnya yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah. Keberadaan suatu mekanisme pendampingan menjadi salah satu solusi yang paling relevan bagi BLUD Puskesmas dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan. Melalui kegiatan pendampingan ini, permasalahan keterbatasan pemahaman akuntansi dapat diatasi oleh pendamping sehingga BLUD tidak terlalu mengandalkan dan menunggu komunikasi dan asistensi dengan bagian akuntansi dari Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah setiap kali terdapat permasalahan. Pada akhirnya, BLUD Puskesmas mitra pengabdian mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kata kunci: BLUD Puskesmas, akuntabilitas keuangan, pendampingan pelaporan keuangan.

ABSTRACT

This community service activity aims to help increase the financial accountability of the Regional Public Service Board (BLUD) for Health Centers in Karanganyar Regency through accrual-based BLUD financial reporting assistance. The Puskesmas BLUD faces various demands for accountability from the laws and regulations that regulate it, one of the most crucial of which is related to financial reporting. At the same time, the BLUD of the Puskesmas has limitations in terms of Human Resources (HR), especially in terms of understanding management and financial reporting, considering that most of the HR managers of finance do not have an accounting and finance background. On the other hand, there are trade-offs that arise in terms of excellent service and financial management accountability during the COVID-19 pandemic which makes this topic interesting to study, especially regarding how the BLUD Puskesmas maintains its financial accountability with an increased risk of fraud that will harm the state. , especially considering the increased budget and workload. The BLUD Puskesmas in Karanganyar Regency has actually procured a financial reporting system in the form of E-BLUD in 2021 to achieve this goal. However, its implementation is not easy because the BLUDs of Puskesmas face several problems such as limited human resources and communication problems with their vertical institutions, namely the Health Office and the Regional Finance Agency. The existence of a mentoring mechanism is one of the most relevant solutions for the BLUD Puskesmas in terms of financial management and reporting. Through this mentoring activity, the problem of limited understanding of accounting can be overcome by the assistant so that the BLUD does not rely too much on and waits for communication and assistance with the accounting department of the Health Office and the Regional Finance Agency whenever there is a problem. In the end, BLUD community service partners were able to prepare financial reports in a complete and timely manner and obtain Unqualified Opinion (WTP).

Keywords: Health center BLUD, financial accountability, financial reporting assistance

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Mike, 2022). Perppu 1/2020 mendorong Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian (Juliani, 2020). Bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan peraturan tersebut telah diikuti dengan melakukan perubahan penganggaran melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020, dimana Belanja Tak Terduga yang dimanfaatkan untuk bencana non alam penanganan pandemi COVID-19 naik sebesar 9.150,77% atau naik Rp 228.769.317.000,00 dari yang semula dianggarkan Rp. 2.500.000.000,00 menjadi Rp 231.269.317.000,00.

Instansi kesehatan memegang peran sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19 karena mereka terlibat secara langsung (Zainal et al., 2021). Instansi kesehatan pemerintah dari berbagai tingkatan berperan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai tugasnya masing-masing, tak terkecuali Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat Indonesia (Hasanah et al., 2020). Puskesmas berperan sangat penting sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 Puskesmas berperan sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat tentang pandemi COVID-19, melacak jejak kontak, memantau terduga kasus, menangani pasien dengan gejala awal yang ringan. Puskesmas juga bertugas untuk melakukan rapid test pada masyarakat¹. Oleh karena itu, Puskesmas cukup banyak menerima tambahan anggaran dan insentif dari pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan aktivitas dan beban kerja mereka, khususnya sebagai dampak banyaknya refocusing *anggaran* ke bidang kesehatan (Ariyanto, 2020).

Keadaan pandemi COVID-19 memaksa Puskesmas melaksanakan beban kerja yang lebih besar dari keadaan normal (Solon et al., 2021). Puskesmas dituntut cepat dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat yang sama mereka harus menjaga akuntabilitas pengeloan keuangan, meskipun dengan keterbatasan SDM yang dimiliki. Puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan lebih dituntut dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan (Mawarni & Wuryani, 2020; Rahmiyati et al., 2020). Hal ini ditengarai fakta bahwa BLUD mempunyai kewenangan atau fleksibilitas dalam bidang keuangan (Sulistiyowati & Sunaningsih, 2023; Radjak, 2022), terlebih untuk menghadapi pandemi COVID-19. BLUD Puskesmas berhak menggunakan pendapatan sendiri, dapat menerima hibah baik dalam bentuk barang dan uang. Dalam keadaan ini, terdapat *trade-off* bahwa BLUD Puskesmas di satu sisi harus cepat dalam pengambilan keputusan keuangan guna melaksanakan tugas, namun disisi lain juga harus taat aturan sehingga transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Trade-off yang timbul dari sisi pelayanan prima dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama pandemi COVID-19 menjadikan topik ini menarik untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana BLUD Puskesmas menjaga akuntabilitas keuangannya. Hal ini mengingat adanya peningkatan risiko akan terjadinya tindakan fraud yang merugikan

negara, terutama mempertimbangkan peningkatan anggaran dan beban kerja serta keterbatasan sumberdaya manusia pada saat yang sama. Pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Karanganyar telah menjadi tantangan yang signifikan bagi BLUD Puskesmas selama beberapa tahun terakhir untuk mewujudkan akuntabilitas. Terjadi beberapa perubahan regulasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menuntut BLUD Puskesmas untuk menjadi institusi yang akuntabel dalam mengelola uang dari negara untuk kepentingan masyarakat. BLUD Puskesmas juga harus menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Ramadhani & Sulistyowati, 2022). Di sisi lain, BLUD Puskesmas juga harus diaudit oleh auditor ekseternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berbagai tuntutan regulasi di atas membuat BLUD Puskesmas harus melaksanakan pencatatan pengelolaan keuangan secara disiplin dan terintegrasi. Keadaan ini dapat dibantu dengan adanya sistem informasi (Kusuma & Andayani, 2022). BLUD Puskesmas di Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah melakukan pengadaan sistem pelaporan keuangan berupa E-BLUD pada tahun 2021 untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pelaksanaannya tidaklah mudah karena BLUD Puskesmas menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Pegawai BLUD Puskesmas yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan merangkap fungsi sebagai tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter sehingga terdapat kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk fungsi pengelolaan keuangan, terlebih di masa Covid-19 ini yang memaksa Puskesmas bekerja ekstra. Pegawai yang melaksanakan fungsi tersebut juga belum tentu memiliki pemahaman akuntansi yang memadai mengingat latar belakang pendidikannya di bidang kesehatan. Dalam hal ini, BLUD Puskesmas di Kabupaten Karanganyar juga hanya memiliki satu tenaga petugas akuntansi sehingga tugasnya terlalu berat.

b. Belum optimalnya koordinasi dengan institusi pemerintah daerah di atasnya

BLUD Puskesmas Jenawi, Jatiyoso dan Jatipuro mengalami kendala dalam koordinasi dengan institusi di atasnya seperti Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah. Dengan demikian, proses rekonsiliasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD Puskesmas sering terjadi keterlambatan.

c. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan

Inspektorat Daerah belum mampu melaksanakan pengawasan dan pembinaan bagi BLUD Puskesmas di Karanganyar karena keterbatasan jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang menjadi kendala internal perlu diakomodasi sesegera mungkin. Masalah komunikasi dengan institusi pemerintah di atasnya juga menjadi isu yang signifikan karena BLUD Puskesmas tidak bisa hanya menunggu asistensi akuntansi dari Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah. Keberadaan suatu mekanisme pendampingan menjadi salah satu solusi yang paling relevan bagi BLUD Puskesmas dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya pendampingan, permasalahan keterbatasan pemahaman akuntansi dapat diatasi oleh pendamping tanpa menunggu dahulu komunikasi

dan asistensi dengan bagian akuntansi dari Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah. Pendampingan juga dapat mengatasi permasalahan pengawasan karena pendampingan akan meningkatkan konsistensi proses pengelolaan keuangan di BLUD Puskesmas. Dengan demikian, BLUD Puskesmas dapat melaksanakan tugas terkait pengelolaan keuangan secara tepat waktu. Adanya kegiatan pendampingan diharapkan mampu membantu BLUD Puskesmas dalam meningkatkan akuntabilitas keuangannya dengan produk akhir berupa Laporan Keuangan BLUD Puskesmas yang sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, disampaikan tepat waktu, dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas ini diharapkan menghasilkan luaran yang positif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas yang lengkap sesuai standar akuntansi yang berlaku (SAP), terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas disampaikan tepat waktu.
- c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas.

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas dilaksanakan pada tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari:

- a. BLUD Puskesmas Jenawi
Alamat: Jl.Raya Balong - Sragen, Balong, Jenawi, Karanganyar
- b. BLUD Puskesmas Jatipuro
Alamat: Jl. Jatipuro - Jatiyoso KM 1 Jatipuro, Karanganyar
- c. BLUD Puskesmas Jatiyoso
Alamat: Margorejo, RT.01 / RW.13 Jatiyoso, Karanganyar

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas ini diselenggarakan dengan beberapa tahap dalam rangka mendapatkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pengabdian masyarakat. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyediakan modul penggunaan sistem akuntansi E-BLUD
- b. Memberikan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan khususnya pada entitas BLUD
- c. Memberikan pengenalan sistem akuntansi E-BLUD
- d. Memberikan pelatihan penggunaan sistem akuntansi E-BLUD

Mengingat jumlah peserta pelatihan yang relatif banyak, maka pelatihan ini akan dibantu oleh beberapa mahasiswa untuk membantu transfer ilmu kepada SDM yang bertugas melaksanakan sistem akuntansi di BLUD Puskesmas terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas dilaksanakan pada tiga BLUD Puskesmas ini dilaksanakan pada BLUD Puskesmas Jenawi, BLUD Puskesmas Jatiyoso, dan BLUD Puskesmas Jatipuro. Ketiga Puskesmas tersebut telah memiliki status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga diwajibkan

menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 99 ayat (1).

Proses Pendampingan Pelaporan Keuangan menggunakan Aplikasi E-BLUD

a. Jenis transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan BLUD

Transaksi BLUD terdiri dari transaksi berbasis kas dan transaksi berbasis akrual. Transaksi berbasis kas diakui pada saat telah terjadi arus kas masuk atau keluar dari kas BLUD. Transaksi berbasis akrual diakui berdasarkan timbulnya hak dan kewajiban BLUD. Jenis transaksi BLUD secara umum mencakup sebagai berikut

1. Pendapatan BLUD, merupakan seluruh penerimaan BLUD dari hasil kegiatan operasionalnya. Penatausahaan atas transaksi pendapatan BLUD berbasis kas dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan. Adapun atas transaksi pendapatan BLUD berbasis akrual dicatat oleh Petugas Akuntansi sesuai dengan besaran hak BLUD setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Belanja dan Beban BLUD, merupakan seluruh pengeluaran BLUD dari untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Penatausahaan atas transaksi belanja dan beban BLUD berbasis kas dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. Adapun atas transaksi belanja dan beban BLUD berbasis akrual dicatat oleh Petugas Akuntansi sesuai dengan besarnya kewajiban BLUD setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Pembiayaan BLUD, merupakan seluruh pembiayaan yang diterima oleh BLUD untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Penatausahaan atas transaksi penerimaan pembiayaan BLUD dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan sedangkan penatausahaan atas transaksi pengeluaran pembiayaan BLUD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.
4. Transaksi lainnya berbasis akrual, merupakan seluruh transaksi yang berbasis akrual selama periode pelaporan seperti penyesuaian beban persediaan, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud, penerimaan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang tidak diakomodasi pada menu Bendahara Penerimaan, utang belanja yang tidak diakomodasi pada menu Bendahara Pengeluaran, dst.

b. Cara kerja aplikasi E-BLUD

E-BLUD adalah aplikasi yang mendukung pendokumentasian administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan BLUD secara real time. Aplikasi E-BLUD ini dirancang untuk bisa diakses secara online sehingga dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Aplikasi E-BLUD merupakan aplikasi terintegrasi yang dapat secara otomatis melakukan kompilasi *entry* transaksi dari berbagai fungsi yang ada di BLUD dan membuat *mapping* atas transaksi-transaksi yang diinput ke dalam laporan keuangan BLUD. Aplikasi E-BLUD memisahkan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan, berfungsi untuk melakukan *entry* atas pendapatan BLUD yang diterima dalam bentuk kas.
2. Bendahara Pengeluaran, berfungsi untuk melakukan *entry* atas belanja BLUD yang dikeluarkan dalam bentuk kas.
3. Pejabat Keuangan, berfungsi untuk melakukan pengesahan atas *entry* pendapatan dan belanja BLUD oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

4. Akuntansi, berfungsi untuk melakukan *entry* transaksi BLUD yang berbasis akrual yang tidak diakomodasi oleh menu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Personil masing-masing yang bertanggungjawab atas fungsi tersebut cukup melakukan *entry* atas seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh BLUD dan mencetak dokumen penatausahaan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban yang secara otomatis disusun oleh aplikasi E-BLUD. Adapun proses pelaporan keuangan secara rinci dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pejabat keuangan melakukan *entry* Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD untuk tahun anggaran yang bersangkutan pada awal periode.
2. Petugas akuntansi melakukan *entry* saldo awal dan jurnal pembalik yang diperlukan di awal periode pelaporan.
3. Bendahara penerimaan melakukan *entry* atas transaksi pendapatan BLUD secara rutin.
4. Bendahara pengeluaran melakukan *entry* atas transaksi belanja BLUD secara rutin.
5. Pejabat keuangan melakukan pengesahan atas *entry* atas transaksi pendapatan dan belanja BLUD setiap bulannya.
6. Petugas akuntansi melakukan *entry* atas jurnal penyesuaian berbasis akrual dan transaksi berbasis akrual lainnya selama periode pelaporan seperti penyesuaian beban persediaan, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud, penerimaan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang tidak diakomodasi pada menu Bendahara Penerimaan, utang belanja yang tidak diakomodasi pada menu Bendahara Pengeluaran, dst.
7. Laporan keuangan dapat dicetak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan 2 orang mahasiswa dari jurusan Akuntansi yang bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara teknis. Kegiatan pengabdian diawali dengan penyusunan dan penyediaan modul penggunaan aplikasi E-BLUD yang selanjutnya diserahkan pada awal kegiatan pengabdian masyarakat. Modul disusun sesuai dengan alur proses transaksi yang digunakan pada aplikasi E-BLUD. Modul aplikasi E-BLUD tersebut memuat keseluruhan proses pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang dijelaskan secara teknis untuk setiap bagiannya. Isi materi Modul aplikasi E-BLUD juga dipisahkan per fungsi untuk memudahkan masing-masing petugas pengelola keuangan BLUD Puskesmas yaitu Kepala Puskesmas, Pejabat Teknis Pengelola Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Akuntansi.




Kegiatan pelatihan dilaksanakan langsung di BLUD Puskesmas masing-masing. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dikoordinasikan oleh ketua tim dengan dibantu oleh anggota dan mahasiswa yang memiliki keterampilan dibidang Akuntansi Sektor Publik. Tim pengabdian kepada masyarakat senantiasa melaksanakan visitasi dan komunikasi secara rutin dengan BLUD Puskesmas. Komunikasi dengan petugas pengelola keuangan Puskesmas juga dilakukan pasca pelatihan guna memantau pelaksanaan *entry* transaksi keuangan BLUD Puskesmas oleh petugas di fungsinya masing-masing. Puji syukur, tim pengabdian berhasil menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan seluruh petugas pengelola keuangan BLUD Puskesmas sehingga dapat menyusun seluruh laporan keuangan yang diwajibkan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan BLUD diasajikan pada Lampiran, adapun ringkasannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Luaran Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Laporan Keuangan	BLUD Puskesmas Jenawi	BLUD Puskesmas Jatiyoso	BLUD Puskesmas Jatipuro
Laporan Realisasi Anggaran	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu
Laporan Operasional	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu
Laporan Arus Kas	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu
Laporan Perubahan Ekuitas	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu
Catatan atas Laporan Keuangan	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu	Tersusun, disampaikan tepat waktu

Laporan keuangan yang telah disusun oleh BLUD Puskesmas wajib dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 99 ayat (7). Pemeriksa eksternal tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah tersertifikasi. Pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang telah disusun oleh BLUD Puskesmas ketiganya dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Payamta yang telah tersertifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 25, Jebres, Surakarta. Hasil pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang disusun oleh BLUD Puskesmas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan atas Suatu Hal yaitu pada akun Persediaan. Ringkasan hasil audit atas laporan keuangan yang disusun oleh BLUD Puskesmas disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Audit Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

No	Puskesmas	Opini atas Laporan Keuangan	Barcode Opini
1	BLUD Puskesmas Jenawi	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
2	BLUD Puskesmas Jatiyoso	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
3	BLUD Puskesmas Jatipuro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	

Meskipun laporan keuangan yang disusun oleh BLUD Puskesmas telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Payamta CPA masih memberikan Penekanan atas Suatu Hal pada laporan keuangan yang

disusun oleh BLUD Puskesmas, yaitu pada akun Persediaan. Pada praktiknya, pencatatan persediaan belum mampu sepenuhnya terakomodasi meskipun BLUD Puskesmas telah menggunakan aplikasi E-BLUD. Hambatan yang dihadapi dalam pencatatan persediaan adalah data update saldo persediaan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa persediaan yang dimiliki Puskesmas namun kewenangan pencatatannya berada pada instansi Dinas Kesehatan ataupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten (BKD) Karanganyar di mana Puskesmas tidak berwenang melakukan pencatatan *update* saldo atas persediaan tersebut.

4. KESIMPULAN

Puskesmas sebagai entitas yang berstatus sebagai BLUD menghadapi tantangan pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi dari tuntutan regulasi. BLUD Puskesmas diwajibkan harus melaksanakan pencatatan pengelolaan keuangan secara disiplin dan terintegrasi dengan laporan keuangan yang diaudit oleh pemeriksa eksternal. BLUD Puskesmas Jenawi, BLUD Puskesmas Jatiyoso, dan BLUD Puskesmas Jatipuro sebagai BLUD baru di Kabupaten Karanganyar juga menghadapi tantangan tersebut dengan pengadaan sistem aplikasi E-BLUD. Namun, keterbatasan SDM dan minimnya pendampingan dari instansi vertikal menjadi penghambat yang signifikan dalam merealisasikan

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas dilaksanakan pada tiga BLUD Puskesmas tersebut dengan tujuan mendampingi BLUD Puskesmas tersebut dalam implementasi E-BLUD dalam pengelolaan keuangan Puskesmas hingga menghasilkan luaran berupa laporan keuangan yang lengkap, relevan, tepat waktu, dan reliabel. SDM petugas pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas telah diberikan modul, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2021. Kegiatan pendampingan menghasilkan luaran yang baik dengan BLUD Puskesmas yang mampu menyampaikan laporan keuangan yang lengkap, relevan, tepat waktu, dan reliabel. Selanjutnya, laporan keuangan BLUD Puskesmas juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pemeriksa eksternal pemerintah.

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pelatihan Sistem Akuntansi E-BLUD Puskesmas yang dilaksanakan pada BLUD Puskesmas Jenawi, BLUD Puskesmas Jatiyoso, dan BLUD Puskesmas Jatipuro, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan beberapa saran untuk pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang lebih baik di masa depan. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. BLUD Puskesmas dapat melakukan rekrutmen pegawai berstatus pegawai BLUD dengan kualifikasi yang relevan di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah untuk membantu pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
2. BLUD Puskesmas dapat senantiasa meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang proses pengelolaan keuangan BLUD di masa depan.
3. BLUD Puskesmas dapat memperbaiki berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal pencatatan dan update saldo beberapa persediaan yang dimiliki Puskesmas namun kewenangan pencatatannya berada pada instansi Dinas Kesehatan ataupun Badan Keuangan Daerah.
4. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan di BLUD Puskesmas agar lebih disiplin, konsisten dan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37-57.
- Hasanah, Y., Dai, R. M., & Sari, D. S. (2020). Implementasi kebijakan fungsi puskesmas selama pandemi COVID 19 di Puskesmas Margahayu Selatan Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 223-239.
- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329-348.
- Kusuma, R. H., & Andayani, S. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi pada Puskesmas BLUD. *SENSASI*, 2(1), 58-64.
- Mawarni, E. A., & Wuryani, E. (2020). Analisis Kinerja Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)(Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1).
- Mike, E. (2022). Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020). *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 65-83.
- Radjak, L. I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 5(2), 103-111.
- Rahmiyati, A. L., Irianto, G., Riyanto, A., & Rizkiyanti, H. D. (2020). Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan setelah Penerapan BLUD di Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. *PIN-LITAMAS*, 2(1), 176-184.
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), 116-124.
- Solon, M., Madu, Y. G., Tolidunde, M., & Megawati, M. (2021). Dampak Beban Kerja Terhadap Tingkat Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 4(2), 94-101.
- Sulistyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2023). Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi BLUD (Studi Kasus di Puskesmas Magelang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 110-131.
- Zainal, A. P., Salmia, L. A., & Septiari, R. (2021). Analisis Beban Kerja Mental Pegawai Dinas Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan). *Jurnal Valtech*, 4(2), 14-18.

First Publication Right
GANESHA Jurnal pengabdian Masyarakat

This Article is Licensed Under

